



## ***Minutes of Meeting***

### **Rapat Konsultasi Forum *Multi Stakeholder Group* EITI Indonesia Penyampaian Hasil Validasi EITI Indonesia dan Konsultasi Forum MSG EITI**

Hari/Tanggal : Selasa, 19 November 2024  
Waktu : 13:30 s.d selesai  
Agenda : Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah  
Industri Ekstraktif  
Tempat : Hotel JS Luwansa  
JI HR Rasuna Said No 22, Karet Kuningan, Jakarta Selatan  
Pimpinan Rapat : Kapusdatin selaku Ketua Sekretariat EITI Indonesia

1. Pembahasan Penyampaian Hasil Validasi EITI Indonesia dan Konsultasi Forum MSG EITI Indonesia dilaksanakan di Hotel JS Luwansa JI HR Rasuna Said No 22, Karet Kuningan, Jakarta Selatan. berdasarkan undangan 441.Und/DI.02/SJD.3/2024 tanggal 12 November 2024. Koordinasi dilaksanakan dan dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Teknologi ESDM, Sekretariat EITI Indonesia / Pusdatin ESDM, EITI, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, BPS, SKK Migas, Pertamina, Dinas ESDM Kalimantan Timur, Dinas ESDM Sulawesi Tenggara, Dewan Ekonomi Nasional, Pertamina, Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM, IMA, APBI, PWYP Indonesia, Auriga Nusantara.
2. Tujuan Koordinasi adalah:
  - a. Penyampaian Hasil Validasi EITI Indonesia
  - b. Penyampaian Hasil Kuesioner dari Stakeholder terkait Implementasi EITI Indonesia
  - c. Penyampaian progres laporan EITI ke-11 tahun fiskal 2022-2023
3. Pembahasan dalam pertemuan meliputi hal-hal sebagai berikut:

#### **Sesi Penyampaian Hasil Validasi EITI Indonesia**

1. Sambutan dari Bapak Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin), ESDM:
  - a. Sambutan diawali dengan penjelasan bahwa Forum MSG merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi tim transparansi pendapatan negara dan daerah di sektor industri ekstraktif, dengan tujuan mendiskusikan pandangan *stakeholder* terkait pelaksanaan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) di Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam pelaksanaan EITI adalah wujud komitmen terhadap *good governance* di sektor industri ekstraktif dan upaya untuk mendukung gerakan anti-korupsi.
  - b. Dalam sambutannya, disampaikan pula berbagai capaian pemerintah, seperti peningkatan partisipasi Indonesia dalam standar internasional EITI yang berhasil memperoleh predikat *Meaningful Progress* pada tahun 2023. Selain itu, peluncuran portal data pada tahun 2023 memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam di sektor minyak, gas, mineral, dan batu bara. Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga meraih penghargaan sebagai instansi terbaik dalam tata kelola pencegahan korupsi berdasarkan penilaian Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi.

- c. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti penurunan Indeks Persepsi Korupsi dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2023, yang menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola di sektor industri ekstraktif untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan membuka peluang akses bantuan internasional. Sebagai langkah strategis, Sekretariat Nasional telah menyebarkan kuesioner kepada stakeholder untuk mendapatkan pandangan terkait manfaat pelaksanaan EITI di Indonesia
  - d. Mengakhiri sambutannya, Kapusdatin menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota MSG atas dukungan dan partisipasi aktif mereka dalam pelaksanaan transparansi sektor ekstraktif di Indonesia. Sambutan ditutup dengan harapan dan doa agar acara berjalan lancar serta membawa manfaat besar bagi tata kelola sektor ekstraktif di Indonesia.
2. Baddy Balde, Wakil Direktur Eksekutif dari EITI:
    - a. Wakil Direktur Eksekutif Sekretariat EITI menyampaikan sambutannya dengan menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan peserta. Beliau mengucapkan selamat kepada Indonesia atas keberhasilan dalam menyelesaikan proses validasi standar EITI serta pencapaian yang kuat berkat kerja keras semua pihak yang terlibat. Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif para *stakeholder* dalam proses ini yang menjadi bagian penting dari implementasi tata kelola transparansi.
    - b. Selanjutnya, beliau menjelaskan dua tujuan utama misi ini. Pertama, untuk menyampaikan keputusan dewan EITI terkait hasil validasi terakhir yang telah diselesaikan oleh Indonesia, sekaligus mendapatkan umpan balik dari para stakeholder mengenai proses tersebut. Kedua, untuk memberikan dukungan kepada negara implementasi, termasuk Indonesia, melalui berbagai program kolaborasi. Program-program ini meliputi transparansi kepemilikan manfaat (*beneficial ownership transparency*), kerjasama dengan Ford Foundation serta peningkatan keterlibatan dan partisipasi komunitas lokal.
    - c. Baddy Balde menekankan pentingnya diskusi dan pertukaran pandangan yang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan.
  3. Aryanto Nugroho, PWYP Indonesia:
    - a. Indonesia memiliki tingkat kompleksitas tata kelola yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain, terutama dalam sektor industri ekstraktif. Kompleksitas ini mencakup lebih dari 4000 izin tambang mineral dan batubara, lebih dari 200 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di sektor minyak dan gas bumi, serta mekanisme perizinan yang bersifat desentralisasi. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah kompleksitas ini diperhitungkan dalam proses validasi EITI, atau apakah validasi dilakukan dengan parameter yang sama untuk semua negara, tanpa mempertimbangkan tingkat usaha (*effort*) yang diperlukan oleh negara-negara dengan tingkat kompleksitas lebih tinggi seperti Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pencapaian dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mentransparansikan tata kelola sektor industri ekstraktif dapat diukur secara adil.
    - b. Selain itu, terdapat pertanyaan terkait dengan level disagregasi data yang menjadi bagian dari validasi. Disagregasi data dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam transparansi, namun perlu kejelasan lebih lanjut mengenai definisi disagregasi yang diukur dalam validasi. Apakah disagregasi ini harus dilakukan berdasarkan wilayah (provinsi, kabupaten, atau desa), berdasarkan komoditas, atau berdasarkan perusahaan)
  4. Fahmi Ibrahim, Auriga Nusantara:
    - a. Beliau menyoroti pentingnya memasukkan isu dampak lingkungan dalam pelaporan EITI. Dalam kunjungan lapangan ke komunitas, ditemukan bahwa banyak persoalan dampak lingkungan, seperti kerusakan danau yang menjadi kawasan wisata serta sumber air bersih, tidak dilaporkan oleh perusahaan terkait. Fahmi mengusulkan agar cakupan pelaporan diperluas, misalnya dengan membuat kluster tertentu yang melibatkan

perusahaan yang memiliki dampak signifikan, terutama yang berhubungan dengan hilirisasi smelter.

- b. Banyak perusahaan besar, termasuk dari China, tidak melaporkan kegiatannya dalam kerangka EITI. Padahal, perusahaan-perusahaan ini memiliki mekanisme tata kelola yang baik di negaranya, tetapi standar tersebut tidak diterapkan ketika mereka beroperasi di Indonesia. Fahmi mempertanyakan bagaimana cara mengajak perusahaan-perusahaan ini untuk mematuhi standar transparansi EITI di Indonesia, sehingga tata kelola yang baik dapat diterapkan secara konsisten. Hal ini penting karena perusahaan-perusahaan ini memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
  - c. Fahmi juga menyoroti adanya pemain kecil, bahkan ilegal, yang beroperasi di sektor pertambangan tetapi tidak tercakup dalam pelaporan EITI. Ia mempertanyakan bagaimana cara melibatkan perusahaan-perusahaan kecil ini, mengingat mereka juga berkontribusi pada kasus-kasus korupsi besar seperti yang telah terjadi sebelumnya.
  - d. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan aktivitas ekstraksi masih minim. Dalam diskusi dengan pemerintah daerah, ditemukan bahwa mereka sering kali tidak memiliki wewenang atau kapasitas yang memadai untuk mengawasi dampak dari aktivitas pertambangan. Sebagai contoh, di Morowali Utara, seorang asisten bupati mengeluhkan tidak adanya aliran air ke sawah karena dialihkan ke smelter, sehingga mengganggu produktivitas pertanian lokal.
5. Ridwan Labotji, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara:
- a. Perwakilan dari pemerintah daerah mengangkat isu terkait transfer dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke daerah. Setiap tahun, penerimaan negara berdasarkan royalti dari perusahaan biasanya ditetapkan secara final di tahun berikutnya. Namun, permasalahan muncul karena sering kali terjadi kekurangan bayar yang baru terdeteksi setelah penetapan final. Dana kekurangan bayar ini tidak segera ditransfer ke daerah, tetapi tertunda hingga 2-3 tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2023, total penerimaan dari sektor terkait mencapai Rp5 triliun, di mana alokasi untuk provinsi dan kabupaten/kota adalah Rp1 triliun. Namun, dana tersebut tidak langsung ditransfer, dengan alasan kemampuan keuangan negara. Perusahaan telah membayar royalti yang dananya tersedia, tetapi proses transfer ke daerah tetap tertunda. Pemerintah daerah berharap agar kekurangan bayar yang terdeteksi setiap tahun dapat segera ditransfer pada tahun berikutnya, misalnya melalui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun yang sama atau pada APBN Perubahan. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa proses ini sering kali baru terealisasi di tahun-tahun berikutnya, seperti tahun 2025 atau 2026 untuk dana yang seharusnya dibayarkan pada 2023.
6. Bapak Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin), ESDM:
- a. Untuk saat ini, fokus utama adalah menentukan apakah ada masukan atau keberatan terkait laporan dan penilaian yang diberikan oleh tim IT sekretariat. Perbaikan ke depan menjadi prioritas, sementara isu-isu lainnya, seperti pengawasan daerah atau dampak lingkungan, dapat terus dibahas secara paralel dalam konteks yang lebih luas.
  - b. Salah satu pertanyaan penting adalah apakah aspek lingkungan masuk ke dalam kriteria penilaian yang dilakukan oleh EITI. Hal ini perlu diklarifikasi mengingat banyak badan usaha yang telah melakukan berbagai inisiatif lingkungan, seperti membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk suplai energi, meskipun sebagian besar masih menggunakan PLTU. Namun, karena penilaian menggunakan standar 2019, upaya-upaya terbaru ini kemungkinan belum tercatat dalam penilaian.
  - c. Indonesia, sebagai negara dengan kompleksitas tinggi dan jumlah badan usaha yang sangat banyak, mempertanyakan apakah penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan skala dan kerumitan tersebut. Dibandingkan dengan negara lain yang memiliki cakupan lebih kecil, penilaian yang menggunakan parameter seragam mungkin kurang mencerminkan realitas di lapangan.

- d. Meskipun banyak upaya telah dilakukan oleh badan usaha dan pemerintah, tidak semuanya tercakup dalam penilaian saat ini sehingga menimbulkan kebutuhan untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai cakupan standar yang digunakan, agar Indonesia dapat terus meningkatkan performanya sesuai dengan kriteria yang relevan
7. Bady Balde, Response:
- a. Kompleksitas:
- i. Diakui bahwa kompleksitas Indonesia tidak sebanding dengan negara lain karena sektor ekstraktifnya yang sangat besar dan beragam, termasuk sistem perizinan yang berjenjang antara tingkat lokal dan nasional. Namun, hal ini tidak berarti bahwa upaya Indonesia tidak dihargai. Kompleksitas ini dipandang sebagai tantangan sekaligus peluang untuk menciptakan dampak besar jika dapat ditangani dengan baik. Semakin kompleks suatu sistem, semakin sulit pula untuk mencapai transparansi.
  - ii. "Lawan transparansi bukanlah kerahasiaan, melainkan kompleksitas." Jika sesuatu bersifat rahasia, cukup dengan mengungkapkan informasi tersebut maka masalah selesai. Namun, jika sesuatu sangat kompleks dengan banyak lapisan proses, diperlukan kerja keras untuk membawa transparansi ke dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, EITI melihat tantangan ini sebagai peluang besar untuk berkontribusi dalam menyederhanakan dan menjelaskan proses agar lebih transparan dan dapat diakses.
  - iii. Salah satu langkah yang dianggap penting adalah peran EITI dalam membantu menyederhanakan sistem dan mengklarifikasi proses perizinan, khususnya bagi aktor internasional maupun investor yang ingin beroperasi di Indonesia. Proses ini menciptakan peluang untuk membuat regulasi lebih jelas dan sistem lebih efisien. Tantangan ini tidak hanya diakui, tetapi juga diterima sebagai peluang untuk bekerja sama lebih keras dan membawa perubahan yang signifikan.
- b. Disagregasi data:
- i. Standar global seperti EITI menyediakan pedoman yang bersifat umum untuk memastikan konsistensi di berbagai negara, seperti Norwegia, Indonesia, dan Peru. Namun, tingkat disagregasi yang paling relevan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di tingkat nasional atau lokal serta lebih baik diputuskan oleh Multi-Stakeholder Group (MSG) di setiap negara dengan mempertimbangkan masukan dari komunitas lokal.
  - ii. Komunitas lokal mungkin membutuhkan jenis data tertentu yang tidak selalu tercakup dalam standar global. Sebagai contoh, mereka mungkin membutuhkan informasi yang lebih rinci berdasarkan wilayah geografis (provinsi, kabupaten, desa), jenis komoditas, atau perusahaan tertentu. Karena kebutuhan ini tidak dapat diatur secara seragam dalam standar global, tingkat detail (granularitas) data yang diperlukan harus ditentukan melalui diskusi dengan komunitas lokal dan pengguna data lainnya.
  - iii. Disagregasi data harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, baik di tingkat pemerintah maupun komunitas lokal. Untuk mencapai disagregasi yang relevan dan berdampak, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, MSG, dan pemangku kepentingan lainnya.
- c. *Scope* perusahaan:
- i. Perusahaan-perusahaan China menunjukkan minat untuk mematuhi standar EITI ketika mereka beroperasi di negara-negara anggota EITI, termasuk Indonesia. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari otoritas setara Kamar Dagang di China, yang mendorong perusahaan China yang beroperasi di luar negeri untuk mematuhi standar EITI di negara yang mensyaratkannya. Bahkan, terdapat permintaan untuk memberikan pelatihan kepada perusahaan-perusahaan China agar mereka memahami dan mematuhi persyaratan EITI dengan lebih baik.

- ii. Selain itu, ada indikasi bahwa perusahaan-perusahaan China sudah lebih aktif dalam memberikan informasi kepada negara-negara seperti Zambia dan Republik Demokratik Kongo (DRC), dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang mengapa interaksi dengan Indonesia relatif kurang aktif, padahal perusahaan-perusahaan China memiliki kehadiran yang signifikan di sektor ekstraktif Indonesia.
  - iii. Kesempatan ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan cakupan pelaporan EITI dengan melibatkan perusahaan-perusahaan China secara lebih aktif. Namun, ini membutuhkan peningkatan efisiensi dalam bagaimana EITI di Indonesia mengelola cakupan pelaporan dan mengundang partisipasi perusahaan asing. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, Indonesia dapat memastikan bahwa perusahaan-perusahaan China, yang memiliki dampak signifikan terhadap sektor ekstraktif, turut berkontribusi pada transparansi dan tata kelola yang lebih baik sesuai dengan standar EITI.
8. Joanne Jones:
- a. Semua hasil validasi EITI, termasuk skor dan laporan lengkap, tersedia di situs web EITI.org. Informasi ini digunakan oleh berbagai pihak, seperti investor internasional, bursa saham, dan organisasi keuangan internasional. Selain skor, komentar dalam laporan validasi juga memberikan konteks yang penting tentang implementasi standar di setiap negara. Sebagai contoh, dalam laporan validasi Indonesia, terdapat kutipan dari Helen Clark, Ketua Dewan EITI, yang menyoroti peluang Indonesia untuk meningkatkan tata kelola serta tantangan terkait transparansi kontrak yang perlu diatasi untuk mencapai transparansi yang lebih baik.
  - b. Disagregasi data harus dilihat sebagai alat komunikasi yang efektif, dengan laporan sebagai mediana. Setiap laporan memiliki audiens yang berbeda, mulai dari komunitas lokal hingga pihak internasional seperti investor dan perusahaan. Multi-Stakeholder Group (MSG) perlu memahami kebutuhan audiens ini dan menentukan informasi apa yang paling relevan untuk disajikan kepada mereka. Data yang disampaikan harus mendukung prioritas pengembangan sektor ekstraktif, menarik investasi, dan meningkatkan dampak penerimaan sektor ekstraktif terhadap perekonomian. Standar EITI memberikan panduan, tetapi ada peluang untuk melampaui persyaratan ini dengan memberikan konteks tambahan yang relevan.
  - c. Validasi Indonesia saat ini dilakukan berdasarkan standar EITI 2019, tetapi validasi berikutnya akan menggunakan standar 2023 yang mencakup isu transisi energi. Standar baru ini memberikan kesempatan besar untuk meningkatkan transparansi terkait lingkungan, seperti publikasi *Environmental Impact Assessments* (EIA) dan pelaporan emisi gas rumah kaca. Standar ini juga mendorong komunikasi terkait dampak lingkungan, seperti penggunaan batu bara dalam transisi energi. MSG di Indonesia dapat memanfaatkan standar ini sebagai alat untuk memperluas pelaporan dan memberikan nilai tambah dalam konteks pengelolaan lingkungan.
9. Sandra Rohas:
- a. Data pembayaran subnasional yang saat ini dilaporkan masih berada pada tingkat agregat dan tidak dibagi berdasarkan wilayah. Komunitas lokal membutuhkan informasi ini untuk mengetahui berapa jumlah dana yang seharusnya diterima oleh daerah mereka dan memahami alasan di balik keterlambatan transfer dana. Selain itu, distribusi dana ke sektor-sektor seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan juga tidak dijelaskan secara rinci. Tidak ada informasi tentang persentase dana yang dialokasikan untuk setiap sektor.
  - b. Kontrak berbasis bagi hasil (*production sharing contracts*) sering kali mencakup informasi tentang pembayaran ke pemerintah daerah dan dana pembangunan komunitas lokal. Namun, masih menjadi pertanyaan apakah kontrak-kontrak ini dipublikasikan dan di mana informasi tersebut dapat ditemukan.

- c. Perusahaan yang berinvestasi dalam proyek baru, termasuk di sektor smelter, diharapkan melakukan penilaian dampak sosial dan lingkungan (*social and environmental impact assessment*). Standar EITI 2023 mensyaratkan dokumentasi penilaian dampak ini, termasuk rencana pemantauan yang harus disiapkan berdasarkan hasil penilaian. Rencana ini harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan serta dipublikasikan untuk transparansi. Selain itu, pelaksanaan rencana tersebut harus dipantau secara berkala karena dampak dapat berubah seiring waktu.
  - d. EITI adalah pedoman global yang memberikan kerangka kerja, tetapi tidak membatasi negara untuk melampaui standar tersebut jika informasi tambahan berguna bagi negara. Indonesia memiliki peluang untuk memperluas cakupan pelaporan, misalnya dengan mencakup data dari perusahaan energi surya atau smelter di wilayah seperti Morowali Utara. Keputusan ini berada di tangan MSG, yang dapat memprioritaskan jenis informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Pelaporan yang lebih luas dan terperinci ini akan disambut baik dan dapat memperkuat laporan EITI Indonesia.
  - e. Sekretariat EITI selalu siap memberikan dukungan jika diperlukan. Negara-negara anggota, termasuk Indonesia, didorong untuk memanfaatkan standar EITI sebagai panduan dan mengembangkannya lebih jauh sesuai dengan kebutuhan nasional.
10. Bapak Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin), ESDM:
- a. Laporan validasi EITI telah diterima, dengan nilai Indonesia meningkat dari 63 menjadi 67. Meskipun ini merupakan pencapaian positif, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang telah dilakukan, namun ada banyak aspek yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan.
  - b. Untuk mengurai kompleksitas, pemerintah, melalui ESDM, telah memangkas banyak izin eksplorasi untuk meningkatkan efisiensi tata kelola. Selain itu, langkah-langkah penanganan aktivitas ilegal, seperti penelusuran uang ilegal (*illegal money trail*), telah ditetapkan dan sedang dalam tahap implementasi oleh organisasi terkait.
  - c. Salah satu tantangan utama adalah pembagian hasil dari sektor ekstraktif ke daerah. Meskipun data jumlah penerimaan telah tersedia setiap tahun, eksekusi pembagian dan transfer dana bukan merupakan kewenangan ESDM, melainkan Kementerian Keuangan. Rencana peluncuran portal oleh Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan transparansi lebih, termasuk rincian kontribusi industri ekstraktif yang dialokasikan kembali ke daerah.
11. Aryanto Nugroho, PWYP Indonesia:
- a. Banyak pihak baru menyadari detail penilaian dan skor validasi setelah draft awal diterima. Oleh karena itu, disarankan agar sosialisasi kepada para stakeholder dilakukan lebih awal sebelum draft hasil validasi dirilis. Sosialisasi ini bisa berupa workshop atau diskusi untuk menjelaskan metodologi penilaian, indikator, serta kriteria yang akan dinilai. Dengan begitu, para stakeholder memiliki waktu untuk memahami proses dan memberikan masukan lebih awal.
  - b. Pada tahap pemberian komentar terhadap draft hasil validasi, sering kali sulit untuk menjelaskan secara detail poin-poin yang kompleks, terutama yang memerlukan konteks khusus, seperti penerimaan *in-kind* di sektor minyak, gas bumi, dan batu bara. Disarankan untuk menyediakan ruang diskusi langsung, seperti pertemuan daring atau luring, di mana MSG dan stakeholder lainnya dapat menjelaskan poin-poin penting secara langsung kepada tim validator.
12. Nilam, Biro KLI menyampaikan tanggapan dari DJPK, Kementerian Keuangan:
- a. PNBPN yang disetor tahun berjalan harus memperhitungkan besaran Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam APBN agar mencerminkan Belanja publik terdelivery secara optimal. Karena pembayaran Kurang Bayar, dihitung berdasarkan LKPP audited di tahun berikutnya maka pembayaran Kurang Bayar bergantung pada APBN tahun berikutnya dan sesuai kemampuan Keuangan negara seperti dalam UU Nomor 1 tahun 2022

- b. Porsi pengawasan Pemda tidak ada karena memang ini PNBPN, jadi hanya di Pusat (DJA, Kemenkeu), namun dalam PMK No. 67 tahun 2024, untuk penyediaan data PNBPN maka perlu melakukan rekon antara Kementerian/Lembaga dengan Pemda per triwulanan.

## **Sesi II. Penyampaian Hasil Kuesioner dari Stakeholder terkait Implementasi EITI Indonesia dan Penyampaian progres laporan EITI ke-11 tahun fiskal 2022-2023**

1. Pandhu, Sekretariat EITI Indonesia/Pusdatin ESDM:
  - a. Sekretariat EITI Indonesia telah menyebarkan survei atau kuesioner kepada anggota MSG untuk memahami sejauh mana peran dan nilai penting EITI di Indonesia. Survei ini dirancang untuk merangkum tanggapan dari para anggota forum MSG terkait keberlanjutan implementasi EITI. Pertanyaan dalam survei tersebut berfokus pada persepsi nilai tambah EITI, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk pengembangan ke depan.
  - b. Sekretariat EITI Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk menerbitkan laporan EITI secara periodik setiap dua tahun. Pada tahun ini, laporan EITI yang ke-11 akan diterbitkan, mencakup dua tahun fiskal sekaligus, yaitu tahun 2022 dan 2023. Laporan ini akan memuat informasi terkini tentang penerimaan dari sektor ekstraktif, transparansi data, serta perkembangan implementasi EITI di Indonesia.
2. Krisna Darma, Sekretariat EITI Indonesia/Pusdatin ESDM:
  - a. Sebagian besar responden (55%) telah mendengar tentang EITI, namun hanya 34% yang memahami prinsip utama, seperti transparansi pendapatan dan pelaporan kepemilikan manfaat. Mayoritas (89%) mengetahui Indonesia telah menjadi anggota EITI sejak 2010.
  - b. Sebanyak 96% stakeholder memiliki tugas terkait transparansi, namun 14% tidak yakin bahwa aktivitas mereka mencerminkan implementasi EITI. Sebanyak 69% mendukung keterbukaan informasi, terutama di sektor penerimaan negara.
  - c. Tantangan utama meliputi pengumpulan data (20%), keterbukaan data (20%), komunikasi (8%), dan komitmen level tinggi. Sebanyak 62% menilai kebijakan saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip EITI.
  - d. Sebanyak 72% menilai implementasi EITI berdampak positif pada tata kelola, dan 82% menganggap EITI meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, manfaat langsung baru dirasakan oleh 75% responden.
  - e. Usulan perbaikan meliputi penguatan strategi komunikasi (27%), peningkatan manfaat bagi kepentingan nasional (18%), dan optimalisasi pelaporan data (6-9%).
  - f. Sebanyak 85% responden mendukung Indonesia untuk tetap menjadi anggota EITI.
3. Pandhu, Sekretariat EITI Indonesia/Pusdatin ESDM:
  - a. Survei kuesioner yang dilakukan kepada para anggota MSG mengungkapkan bahwa mayoritas stakeholder (85%) mendukung keberlanjutan keanggotaan Indonesia di EITI. Namun, sekitar 20% responden merasa belum mendapatkan manfaat langsung dari implementasi EITI sehingga mencerminkan tantangan dalam menyampaikan manfaat konkret EITI kepada semua pihak yang terlibat, terutama perusahaan. Dari survei tersebut, sebanyak 27% responden merekomendasikan pengembangan strategi komunikasi untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan stakeholder.
  - b. Tingkat partisipasi perusahaan dalam pengisian kuesioner masih menjadi kendala utama. Dari total perusahaan yang dihubungi, hanya sekitar 56% perusahaan migas yang melaporkan data, sementara untuk sektor minerba, tingkat partisipasinya bahkan kurang dari 10%. Rendahnya tingkat partisipasi ini berdampak langsung pada kelengkapan laporan. Selain itu, pengumpulan data dari pemerintah, terutama terkait penerimaan negara, masih menghadapi hambatan seperti agregasi data yang belum optimal dan aksesibilitas data yang terbatas.

- c. Sekretariat EITI mengusulkan perpanjangan tenggat waktu pengumpulan data dan penyusunan laporan hingga melewati Desember 2024 untuk memastikan bahwa data yang lebih lengkap dan valid dapat dimasukkan ke dalam laporan. Perpanjangan ini menjadi penting mengingat batas waktu yang semakin dekat, sementara tingkat partisipasi perusahaan dalam pelaporan masih rendah.
4. Puji Harjanto, Dinas ESDM Kalimantan Timur:
    - a. Masyarakat lokal di sekitar wilayah eksploitasi sumber daya alam, seperti migas dan batubara, sering kali tidak dilibatkan dalam proses tata kelola dan pengambilan keputusan. Padahal, masyarakat ini adalah pihak yang paling terkena dampak dari aktivitas industri ekstraktif. Ironisnya, daerah-daerah dengan potensi sumber daya alam justru sering menjadi wilayah yang tertinggal secara ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur, meskipun tujuan eksploitasi seharusnya untuk memakmurkan masyarakat.
  5. Pandhu, Sekretariat EITI Indonesia/Pusdatin ESDM:
    - a. Sekretariat EITI mengakui bahwa platform EITI memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang meluas, termasuk dalam menangani isu-isu kompleks yang bersinggungan langsung dengan masyarakat lokal di sekitar wilayah eksploitasi sumber daya alam. Salah satu kekuatan EITI adalah keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, yang berperan aktif memberikan masukan terhadap implementasi EITI, seperti yang dilakukan oleh beberapa anggota MSG. Namun, diakui bahwa masih ada kekurangan, terutama dalam menangkap kompleksitas masalah di lapangan yang sering kali melibatkan konflik sosial, keselamatan kerja, hingga dampak lingkungan.
    - b. Sekretariat telah menyediakan kanal komunikasi terbuka, seperti email dan rapat rutin MSG, untuk menerima masukan dari masyarakat dan stakeholder lainnya.
  6. Aryanto Nugroho, PWYP Indonesia:
    - a. Menyarankan agar laporan EITI berikutnya difokuskan untuk memperbaiki skor rendah pada hasil validasi sebelumnya. Beberapa prioritas yang diusulkan mencakup:
      - i. Transparansi kontrak, terutama kontrak yang dikeluarkan setelah tahun 2021, fokus pada kontrak baru ini memungkinkan pendekatan yang lebih spesifik.
      - ii. Koleksi data disagregasi yang lebih mendalam.
      - iii. Peningkatan pelaporan pendapatan dalam bentuk natura (*in-kind*).
    - b. Melibatkan instansi terkait secara langsung sesuai dengan area yang menjadi tanggung jawab mereka untuk memastikan tanggung jawab yang lebih jelas dan terarah dalam memperbaiki skor validasi.
    - c. Perusahaan yang tidak melaporkan data diberikan notifikasi resmi bahwa kontribusi mereka yang minim berdampak negatif pada skor EITI Indonesia.
    - d. Kesenjangan informasi antara tingkat pusat dan masyarakat lokal di sekitar tambang menyebabkan informasi yang ada di portal atau website kementerian sering kali tidak sampai ke masyarakat lokal. Beberapa hal yang diusulkan di antaranya:
      - i. Membuat **WhatsApp Channel** untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat lokal secara langsung dan mudah diakses.
      - ii. Membentuk **Multi-Stakeholder Forum (MSF) di Tingkat Lokal** yang terkait langsung dengan MSG nasional. Forum ini bertujuan untuk menangkap isu-isu lokal dan menyampaikan rekomendasi ke tingkat pusat.
  7. Krisna, Sekretariat EITI Indonesia/Pusdatin ESDM:
    - a. Membahas transisi sekretariat EITI dari Kementerian Perekonomian ke Kementerian ESDM pada 2020 melalui Perpres 82 tahun 2020. Namun, pencabutan Perpres 82 memunculkan pertanyaan terkait dasar hukum pelaksanaan transparansi saat ini sehingga diusulkan agar dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan fungsi transparansi meskipun regulasi sebelumnya telah dicabut.
  8. Catur K, Sekretariat EITI Indonesia/Pusdatin ESDM:

- a. Meskipun Perpres terkait dicabut, berdasarkan kuesioner yang telah disebar kepada para stakeholder, keberadaan EITI tetap dipandang penting oleh stakeholder.
  - b. Beliau mengusulkan agar kesepakatan tentang keberlanjutan EITI perlu diresmikan dalam dokumen atau forum resmi.
  - c. EITI International meminta Indonesia untuk menyelenggarakan global conference di tahun 2026. Global conference rutin dilakukan tiap 2 tahun sekali.
9. Aryanto Nugroho, PWYP Indonesia:
- a. Menjelaskan bahwa pencabutan Perpres hanya berlaku untuk fungsi penanganan COVID-19 dan pengelolaan ekonomi nasional, sedangkan tugas transparansi tetap berjalan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa anggaran pelaksanaan EITI masih digunakan oleh ESDM tanpa ada masalah.
  - b. Mengusulkan penguatan kelembagaan EITI di tahun mendatang, termasuk menyusun regulasi baru yang lebih sesuai dengan struktur kementerian saat ini.

#### 4. Kesepakatan dan Tindak Lanjut:

##### Kesepakatan:

1. MSG menyepakati untuk meminta perpanjangan tenggat waktu hingga setelah Desember 2024 agar dapat menyertakan data yang lebih lengkap dari perusahaan pelapor.
2. Laporan EITI berikutnya akan menambahkan hal yang menjadi *corrective action* dari hasil validasi sebelumnya, terutama untuk *requirement* yang memiliki skor rendah,
3. MSG sepakat untuk melanjutkan implementasi EITI Indonesia berdasarkan hasil survei *stakeholder* dan konsultasi rapat MSG.
4. MSG mengusulkan pada *Work Plan 2025* membahas terkait penguatan kelembagaan dan komunikasi lokal melalui media sosial seperti *Whatsapp Community* untuk mengetahui informasi terbaru seputar Industri Ekstraktif.
5. MSG menyetujui untuk mengirimkan kembali surat permintaan data perusahaan dan kelengkapan untuk laporan EITI ke-11 sebagai komitmen terhadap transparansi Industri Ekstraktif

##### Tindak Lanjut:

1. Sekretariat EITI akan membuat surat terkait permohonan perpanjangan pelaporan EITI ke-11 tahun fiskal 2022-2023.
2. Sekretariat EITI akan membuat surat dari pak Sekjen ESDM ditujukan kepada para stakeholder EITI terkait Penyampaian *Hasil Validasi dan Corrective Action* dari *International Secretariat*.
3. Sekretariat EITI akan membuat rancangan Kepmen Anggota terbaru sesuai dengan nomenklatur pemerintahan yang baru.
4. Sekretariat EITI akan membuat surat permintaan data perusahaan kembali yang ditujukan kepada Kepala SKK Migas dan unit teknis terkait dan Direktorat Jenderal Minerba perihal Pengisian Kuesioner Perusahaan Laporan EITI ke 11 dan akan melampirkan daftar perusahaan migas dan minerba yg belum menyampaikan kuesioner EITI 11.

##### Bahan Materi MSG 19 November 2024:

<https://tinyurl.com/MateriMSG19Nov2024>

## Absensi

**DAFTAR HADIR**  
**Rapat Forum Multi Stakeholder Group (MSG)**  
**Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah Industri Ekstraktif**  
**Hotel JS Luwansa, Jakarta**

Tanggal : 19 November 2024

NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	EMAIL	TANDA TANGAN
1	Chusman Anshary	Pusdatin			
2	Krisna Dharma P.W	Pusdatin			
3	Padihalil	Pusdatin			
4	Cahar	Pusdatin			
5	Ibrahim Talang	Amngra Nusantara	08		
6	Amulya S.D	K-BUMN			
7	Haaf M. Zulmi	KBUMN			
8	Yosafat	Interpreter			
9	Stace	Interpreter			
10	M. Dhotay	SUK MCGG			
11	Herman F. Pandeyot	"	08		
12	Nilam Rakhmawati	Kemenkeu			
13	HARISWORO	IPMA			
14	Puji Haryanto	DESDM Kaltim			
15	Jendi Sinagari	DESDM Kaltim	0812580819		

**DAFTAR HADIR**  
**Rapat Forum Multi Stakeholder Group (MSG)**  
**Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah Industri Ekstraktif**  
**Hotel JS Luwansa, Jakarta**

Tanggal : 19 November 2024

NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	EMAIL	TANDA TANGAN
16	Nony M.C	Pusdatin	0812580819	M.namdeo@pda.go.id	
17	Adhi S	SKK Migas			
18	Ridwan Botji	PTNS ESDM PIRIS			
19	M. Winarna	KBUMN			
20	MICAEL AUST A	KBUMN			
21	M. Harhan	stokman			
22	Karoly Balala	EITI			
23	Sandra Rojas	EITI			
24	Channe Jones	EITI			
25	Sarah Hayton	EITI			
26	Emily Maruzel	Dper Bunsalip			
27	Feri Kurniawan	Deknas			
28	Hendrick W	Pertamina			
29	Mustahid D.A	pertamina			
30	Nurul Rahmawati	BPS			



DAFTAR HADIR  
Rapat Forum Multi Stakeholder Group (MSG)  
Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah Industri Ekstraktif  
Hotel JS Luwansa, Jakarta

Tanggal : 19 November 2024

NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	EMAIL	TANDA TANGAN
31	Kaela Nisa L.	Pertamina Sustainability			
32	Anyanto	Ditjen			
33	Anggi Z	Desdam Kaltim			
34	Joy Levin	Desdam Kaltim			
35	Sulistiyono Hermawati	Pusdahin			
36	ADI IC	Ditjen AHU			
37	Iboreina	Ditjen AHU			
38	Dyah A	Ditjen AHU			
39	Feka Annisa S	KBUMN			
40	Siska Purnama S.	KBUMN			
41	Marvin G. J.	APBI			
42	Christine Elizabeth	Pusdahin Esdm			
43	Alin A.A	Pusdahin / Sebetma			
44				<input type="checkbox"/>	44
45				<input type="checkbox"/>	45

## Dokumentasi

